

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS LINGKUNGAN**



**OLEH:**

**Dr. Bagyo Yanuwadi  
Drs. Indarwanto, M.Si  
Dr.Ir. Harsuko Riniwati, MP  
Ir. Mohammad Razif, MM**

**PROGRAM DOKTOR ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
2015**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Judul Pengabdian : Kebijakan Publik berbasis Lingkungan

2. Ketua Pelaksana

- a. Nama : Dr. Bagyo Yanuwiadi
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 196001181986011001
- d. Pangkat/Golongan : III-c
- e. Jabatan Fungsional : Lektor
- f. Sedang Melakukan Pengabdian : Ya / Tidak
- g. Fakultas : Fakultas MIPA
- h. Jurusan : Biologi
- i. Bidang Keahlian : Pengelolaan Lingkungan

3. Anggota Pelaksana

3.1. Anggota Pelaksana

NO	NAMA	NIP	BIDANG KEAHLIAN
1	Dr. Bagyo Yanuwiadi	196001181986011001	Pengelolaan Lingkungan
2	Drs. Indarwanto, M.Si		
3	Dr.Ir. Harsuko Riniwati, MP	196606041990022001	Ekonomi Mikro dan Manajemen Sumberdaya Manusia

3.2. Nama/NIM Mahasiswa yang dilibatkan

NO	NAMA	NIM
1.	Ir. Mohammad Razif, MM	127150100111019

- 4. Jangka Waktu Pengabdian : 6 (enam) bulan
- 5. Biaya yang dibutuhkan : Rp. 15.000.000,00
- 6. Sumber Pembiayaan : PNBPN

Menyetujui  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Brawijaya

Malang, 20 April 2015  
Ketua Pelaksana

Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si  
NIP.196102021985031006

Dr. Bagyo Yanuwiadi  
NIP. 196001181986011001

SUSUNAN TIM PELAKSANA

No	Nama/Gol./Bidang Keahlian/Instansi	Tugas Dalam Pengabdian/Jam Kerja per Bulan	Tanda Tangan Kesiediaan Aktif dalam Pengabdian
1	Dr. Bagyo Yanuwiadi/III-c/ Pengelolaan Lingkungan - Pengendalian Hayati /FMIPA – Universitas Brawijaya	Ketua Pelaksana: Koordinator Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, Mengkoordinasi Pelaksanaan Pengabdian dan Presentasi Laporan.	
2	Drs. Indarwanto, M.Si/-/Kebijakan Publik berbasis Lingkungan/PPS Universitas Brawijaya		
3	Dr.Ir. Harsuko Riniwati, MP/ IV-a -/ Ekonomi Mikro dan Manajemen Sumberdaya Manusia /Faperik - Universitas Brawijaya		

## BIODATA KETUA DAN ANGGOTA PENGABDIAN

### Ketua Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. Bagyo Yanuwiadi  
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 18 Januari 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Bidang Keahlian : Pengelolaan Lingkungan / Pengendalian Hayati

### Pendidikan

No	Tempat Pendidikan	Kota/Negara	Tahun Lulus	Bidang Studi
1	Sarjana, Universitas Gajah Mada	Yogyakarta, Indonesia	1985	Ekologi
2	Doktoral, University of Bonn	Bonn, Germany	1993	Pengendalian Biologis

### Pengabdian yang telah dilakukan

No	Judul Pengabdian	Ketua Pelaksana/Anggota	Sumber Dana	Tahun
1	Usaha Introduksi Pertanian Organik untuk Solusi Kerusakan Lingkungan	Anggota		2007
2	Pengenalan Beberapa Jenis Tumbuhan yang Berpotensi Mendukung Lebah Madu untuk Reforestasi Lahan Bekas Hutan (Penerapan Iptek)	Ketua		2003
3	Penyuluhan Kesehatan (Penyakit Scabies) di Pondok Pesantren An – Nuur Bululawang Malang	Anggota		2000

Malang, 20 April 2015

Dr. Bagyo Yanuwiadi  
NIP. 196001181986011001

## Anggota Pengabdian

Nama Lengkap : Drs. Indarwanto, M.Si  
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 20 Oktober 1959  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Bidang Keahlian : Sosiologi, Kebijakan Publik berbasis Lingkungan

## Pendidikan

No	Tempat Pendidikan	Kota/Negara	Tahun Lulus	Bidang Studi
1	Sarjana, Universitas Merdeka	Malang/Indonesia	1985	FISIP
2	Magister, Universitas Brawijaya	Malang/Indonesia	1998	Kebijakan Publik
3	Doktor, Universitas Merdeka	Malang/Indonesia	2001	Ilmu Sosial

## Pengabdian yang telah dilakukan

No	Judul Pengabdian	Ketua Pelaksana/Anggota	Sumber Dana	Tahun
1	Program Embun Pagi Islami, Radio Mas FM	Narasumber	Mandiri & Radio Mas FM	2005
2	Kiprah Djati, Dhamma TV	Narasumber	Mandiri	2011
3	Motivasi, UB TV	Narasumber	Mandiri	2012

Malang, 20 April 2015

Drs. Indarwanto, M.Si

## Anggota Pengabdian

Nama Lengkap : Dr.Ir. Harsuko Riniwati, MP  
Tempat/Tgl. Lahir : Madiun, 04 Juni 1966  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Bidang Keahlian : Ekonomi Mikro dan Manajemen Sumberdaya Manusia

## Pendidikan

No	Tempat Pendidikan	Kota/Negara	Tahun Lulus	Bidang Studi
1	Sarjana, Universitas Brawijaya	Malang/ Indonesia	1989	Sosial Ekonomi Perikanan
2	Master, Universitas Gajahmada	Yogyakarta/ Indonesia	1995	Ekonomi Pertanian
3	Doktoral, Universitas Airlangga	Surabaya/ Indonesia	2006	Manajemen Sumberdaya Manusia

## Pengabdian yang telah dilakukan

<ul style="list-style-type: none"><li>Manajemen Usaha Bagi Usaha Mikro Produktif Propinsi Jawa Timur. Tahun 2009. Deputi Bidang Pengembangan SDM. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Malang Propinsi Jawa Timur. (<b>Pemateri</b>)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Materi Capacity Building Aparatur Daerah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP). Kota Probolinggo, 27 Oktober 2009. Aplikasi Merancang Pemberdayaan Masyarakat. (<b>Pemateri</b>)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Seminar Nasional, Interdisciplinary Studies Seminar (ISS) ke IX, Tema : Pendidikan bagi Anak Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perubahan Sosial dan Lingkungan di Indonesia. Kerjasama Program Magister Kajian Perempuan (PMKP) PPSUB dengan Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Brawijaya (Ketua Pelaksana)</li></ul>

Malang, 20 April 2015

Dr.Ir. Harsuko Riniwati, MP  
NIP. 196606041990022001

## I. JUDUL

### FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS LINGKUNGAN

## II. ANALISIS SITUASI

Keberadaan program Pascasarjana Interdisipliner Universitas Brawijaya Malang (PPSUB Malang) merupakan proses pengembangan program studi Magister dan Doktor yang cikal bakalnya program studi mono disipliner sebagai bentuk pengembangan dan peningkatan program studi yang berada dibawah fakultas dilingkungan UB Malang. Semula program pascasarjana UB Malang berorientasi pada mono disipliner. Masing-masing program studi Magister berdiri sebagai minat dari sejumlah program Magister.

Seiring dengan tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di dunia program pasca sarjana UB turut mengembangkan program studi dan minat dalam berbagai bidang ilmu. Pengembangan keilmuan yang visioner serta diharapkan mampu menjawab tantangan peradaban umat manusia adalah ilmu yang bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Pengembangan ilmu yang dimaksud adalah dari mono disipliner menjadi interdisipliner atau lintas bidang ilmu (interdisipliner). Adapun program studi Magister yang berdimensi lingkungan dan berpendekatan interdisipliner yaitu :

Program Magister dan Doktor pada PPSUB yang terdiri dari Program Magister :

1. Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan (PSLP)
2. Wawasan Ketahanan Nasional (Wasantanas)
3. Studi Wanita

Sedangkan Program Doktor adalah Kajian Ilmu Lingkungan. Semua Program Studi tersebut jika dilihat dari sisi ilmu sosial sangat bersentuhan dengan *public policy* (kebijakan publik). Berdasarkan latar belakang pemikiran dan gambaran singkat keberadaan PPSUB baik program studi Magister maupun Doktor pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk membekali peserta didik atau alumni dengan Sertifikat Pendamping Ijazah yang berbasis kebijakan publik dengan orientasi lingkungan.

Latar belakang disiplin keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa Program Magister dan Doktor terdiri dari ilmuwan sosial, *science*, teknokrat serta berlatar belakang *full student*, guru, dosen, birokrat, politisi, pemerhati lingkungan dan aktivis pengelola lingkungan. Masing-masing latar belakang bidang keilmuan dan pekerjaan merupakan kekayaan tersendiri bagi institusi PPSUB maupun peserta didik. Bagi PPSUB ragam latar belakang keilmuan dapat dijadikan modal untuk lebih mengembangkan institusi yang berbasis interdisipliner. Sedangkan bagi mahasiswa atau alumni kompleksitas latar belakang keilmuan dan profesi masing-masing peserta didik dapat saling memberi pengayaan ilmu pengetahuan, *science* atau pengalaman profesional.

Dilihat dari segi usia memang PPSUB masih relatif baru akan tetapi institusi ini diasuh oleh dosen-dosen profesional yang bergelar Doktor dan berstatus Guru Besar dengan pengalaman proses belajar mengajar yang sudah berpuluh-puluh tahun. Disamping itu para tenaga pendidik tersebut kebanyakan tidak sekedar memiliki kemampuan lokal dan nasional namun juga internasional.

Pada gilirannya peserta didik Magister maupun Doktor yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri merasakan indahnya Taman Ilmu karena diasuh oleh insan-insan yang profesional dengan sangat kekeluargaan yang tinggi. Disamping itu, tenaga kependidikan yang profesional serta penuh keakraban dan kekeluargaan dengan mahasiswa masih ditunjang dengan tenaga administrasi yang cekatan dan memiliki sopan santun yang tinggi. Kedua hal tersebut masih ditunjang dengan fasilitas proses pembelajaran yang memadai serta letak strategis keberadaan PPSUB di jantung kota Malang. Bergayutan dengan itu tak berlebihan jika di candra PPSUB mempunyai daya tawar yang tinggi di tengah persaingan berbagai institusi yang mengelola program interdisipliner. Menjadi niscaya program studi yang berbasis interdisipliner ini selalu membuka dirinya untuk

inovasi. Salah satu bentuk inovasi adalah pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) – khususnya dalam formasi kebijakan.

### III. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perspektif formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah di Indonesia sebenarnya dapat dimasukkan paradigma negara organik dan korporatis ataupun neo-statist, karena dalam kebijakan umum pemerintah Indonesia memberikan kesempatan pada pranata-pranata sosial atau lembaga keswadayaan masyarakat untuk turut mewarnai pembangunan, sementara pemerintah pusat dan juga daerah baik langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah atau bahkan memaksakan kehendaknya dengan dalih demi kepentingan umum atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Mengingat ketiga karakteristik negara tersebut kental di Indonesia maka hal ini dapat disebut sebagai perwujudan paradigma campuran antara negara organik, korporatis dan neo-statist. Jika dibuat ilustrasi yaitu bagaimanapun seorang bapak menjamin kebebasan sang anak, namun dalam prinsip-prinsip tertentu seorang anak diwajibkan mengikuti pola pikir dan atau sikap sang bapak, jika tidak demikian sang anak tidak akan mendapatkan respon dari sang bapak. Hakim (1993) dalam analisisnya mengisyaratkan bahwa negara sedang berkembang umumnya mempunyai peranan yang deterministik, menentukan dalam kehidupan sosial walaupun secara finansial ataupun yang lainnya mempunyai kemampuan terbatas, namun keinginannya melakukan fungsi-fungsi penetratif lebih besar dibanding dengan negara-negara maju. Karenanya dalam konteks daerah, Hardjono (1983) mengatakan bahwa banyak program pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan teknokratis bersifat top down. Sebagai contoh pembangunan pertanian melalui "revolusi hijau" yang ditujukan untuk mencapai swasembada beras.

Keberadaan pranata formal yang lahirnya dibidani oleh pemerintah pusat, seperti; Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk di dalamnya HIPPA menandakan kuatnya campur tangan pemerintah dalam urusan pemerintahan desa, sekaligus kadang-kadang juga berarti menunjukkan ketakberdayaan pranata sosial desa yang bersifat tradisional. Kondisi ini semakin kentara manakala dilihat dari menguatnya peran pemerintah dalam mengendalikan pranata sosial formal, semakin memberikan kejelasan bahwa posisi pranata sosial swadaya masyarakat terlihat lemah dan kurang berdaya. Hal terakhir dapat diatasi kecuali jika situasi yang diciptakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tunggal di desa dapat diejawantahkan dalam bentuk yang luwes (fleksibel) dan berfihak kepada anggota masyarakat (warga desa). Jika situasi terakhir tersebut dapat diciptakan maka pertanda sifat "bifrontal dan segmenter" sebagai ciri Otoritarisme Birokrasi yang ditengarai dalam studi Guillermo O'Donnell pada tahun 1980-an, dapat dihindari atau diperkecil secara perlahan-lahan (Mas'oed, 1989:). Namun campur tangan (penetrasi) negara ke dalam desa tersebut dirasa masih perlu dicermati karena negara menuntut monopoli pengabsahan atas lembaga-lembaga dan prosedur yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik dan ekonomi warga desa (Mas'oed, 1994: 126). Hal ini juga terbukti dengan adanya legitimasi keputusan-keputusan desa oleh fihak Pemerintah Kabupaten ataupun Kota.

#### a. Pranata Sosial Informal

Pranata sosial yang berasal dari warga desa dianggap semakin penting, karena kemungkinan besar akan mampu menghantar warga desa pada cita-citanya. Karenanya tidaklah mengherankan jika pentingnya kelembagaan masyarakat yang berswadaya di pedesaan telah banyak ditulis oleh pakar pembangunan pedesaan.

Bunch (1992: 267-268) menuturkan pentingnya kelembagaan tersebut; pertama, karena banyak masalah yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga, seperti perkreditan, pembasmian hama, penyebaran inovasi pertanian dan lain-lain di samping



dapat berperan sebagai perantara antara lembaga yang bergerak secara makro/ besar dan warga. Kedua, karena dapat memberi kelanggengan pada warga desa untuk terus menerus mengembangkan usahanya, seperti untuk mengembangkan teknologi dan menyebarkannya. Ketiga, karena dapat mengorganisasi warga desa untuk dapat bersaing dengan pihak luar. Dengan demikian menampakkan bahwa tatkala lembaga-lembaga tradisional tidak lagi mampu mengentas permasalahan warga yang rasional maka tampillah lembaga-lembaga modern menjadi alternatif pemecahan masalah. Ketika masalah pembangunan mulai mengemuka, maka lembaga-lembaga modern yang dapat mengadopsi unsur-unsur perubahan sosial yang terjadi, menjadi sangat dibutuhkan. Akibatnya terjadi pergeseran peranan lembaga dari sifat tradisional-komunal menjadi lembaga asosional yang didasarkan pada rasio atau kepentingan (Lihat Sartono, 1990:78).

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan cita-cita pranata sosial biasanya ditempuh beberapa jalan. Menurut analisis Sanit (1994: 190); "Cara yang lazim dimanfaatkan oleh lembaga kemasyarakatan dalam rangka memperjuangkan kepentingan dan tujuannya, yaitu mengembangkan kemampuan seluruh warga, terutama para pemimpin supaya handal mencapai tujuan pribadi bersamaan dengan tujuan lembaga". Untuk itu diusahakan supaya pengetahuan dan penguasaan teknologi segenap warga dan pimpinan ditingkatkan. Pendidikan dan latihan merupakan sarana untuk mencapai sasaran ini.

Di samping itu, fasilitas dipandang sebagai unsur penting pula dalam usaha lembaga kemasyarakatan mencapai tujuannya. Berkenaan dengan itu usaha untuk meningkatkan fasilitas bagi usaha- usaha lembaga/ pranata dijalankan secara terus-menerus, dengan menggunakan cara-cara tertentu dengan memanfaatkan teknologi setepat mungkin atau teknologi tepat guna. Untuk menutupi kemampuan teknis keorganisasian tersebut di atas, maka lembaga kemasyarakatan cenderung memanfaatkan kekuatan massanya di samping menggunakan rasa simpati dan dukungan masyarakat luas (Sanit, 1994: 192).

Berbagai teknik yang dimanfaatkan di dalam perjuangan politis dari organisasi kemasyarakatan ialah, memanipulasikan pendapat umum (public opinion). Bagi pendukung lobby organisasi kemasyarakatan terhadap pemerintah, penguasa, birokrasi, seperti juga menghadapi lembaga kemasyarakatan lainnya; maka dapat diselenggarakan musyawarah untuk mencapai kemufakatan, usul-usul yang bersifat informal, bulan bhakti, sarasehan, simulasi, dan penjelasan-penjelasan umum lainnya. Pendapat umum yang terbentuk oleh kegiatan tersebut akan menjadi kekuatan bagi lembaga tersebut. Dewasa ini teknik utama bagi perjuangan lembaga kemasyarakatan ialah membujuk dan lobby. Penggunaan pendapat umum amat tipis, hampir tidak dikenali lagi rapat umum (kecuali di masa kampanye untuk pemilihan umum) (Sanit, 1994: 194).

Seperti diketahui bahwa kelompok swadaya masyarakat muncul atas inisiatif masyarakat sendiri dengan tujuan pokok memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat baik secara individual maupun secara kelompok. Kuatnya kelompok ini disebabkan karena dasar persaudaraan dan perasaan senasib dalam menghadapi kesulitan menjadi determinan utama. Melalui kelompok yang dapat membawa aspirasi bersama, masyarakat akan dapat lebih banyak ikut serta dalam proses pembangunan yang partisipatif, yaitu proses pembangunan dimana masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan rencana, menggunakan hasil pembangunan, menikmati hasilnya dan pada gilirannya ikut melestarikan hasil-hasilnya (Sumodinigrat dan Mudrajat, 1990 ).

Kelompok swadaya masyarakat mandiri mempunyai karakteristik: pertama menyadari permasalahan yang mereka hadapi, kedua mengetahui potensi dan kelemahan yang melekat pada dirinya, dan ketiga menentukan pilihan terhadap berbagai alternatif yang ada dengan memperhitungkan kesempatan dan ancaman yang ada (Ismawan dan Kartjono, 1985: 36).

Kelompok swadaya masyarakat atau pranata sosial yang mandiri biasanya berasal dari kelompok-kelompok kecil di wilayah yang amat kecil juga, misalnya di tingkat Rukun Tetangga (RT), tingkat Rukun Warga (RW) atau di pedukuhan atau pedusunan. Pranata sosial yang beranggotakan kelompok-kelompok kecil dari bagian masyarakat ini biasanya lebih efektif dalam kegiatannya sehingga seringkali sumbangsuhnya tidak sedikit terhadap roda pemerintahan dalam proses pembangunan fisik maupun nonfisik. Tjondronegoro, (1977) menjelaskan: "Kelompok selapanan yang ada pada masing-masing dusun dapat menjadi forum bagi masyarakat untuk menggalang sumberdaya yang mereka miliki". Karena, tingkat lembaga atau kelompok yang bisa membangkitkan partisipasi anggota adalah pada tingkat pedusunan, dengan anggota beberapa puluh Kepala Keluarga (KK) dan melepaskannya dari ikatan erat dengan gugus kepamongan. Hal ini yang kemudian nampaknya mengilhami lahirnya persepuluhan pada kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa- desa maupun di perkotaan (Mubyarto, dkk., 1994: 62).

Kelompok swadaya masyarakat merupakan pengejawantahan dari semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas dengan manfaat sumberdaya yang mereka miliki. Swadaya masyarakat juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia sebagai hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat.

Aktivitas lembaga masyarakat ini berkaitan langsung dengan kepentingan keseluruhan anggota atau pendukung lembaga itu sendiri. Dikemukakan seperti itu, karena tidaklah dapat diabaikan adanya kenyataan bahwa pembentukan lembaga dimaksudkan untuk melayani kepentingan anggota atau pendukung tersebut. Karena kepentingan pada hakekatnya merupakan perwujudan dari satu atau beberapa aspek kehidupan, maka aktivitas lembaga pun diarahkan kepada aspek kehidupan yang menjadi perhatian atau kepentingan utama dari anggota ataupun pendukung lembaga yang bersangkutan (Sanit, 1995: 181). Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan, pertama kali tentulah tujuan organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi keperluan anggotanya sebaik mungkin. Kesejahteraan anggota secara umum dianggap sebagai sasaran utama lembaga semacam itu.

Dalam nada yang mirip seperti di atas Ismunawan (1992: 86) menuturkan: "Kelompok swadaya masyarakat adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama". Dengan kata lain, kelompok swadaya masyarakat merupakan suatu alat yang dapat menggerakkan sumber daya desa guna mempertinggi pencapaian kesejahteraan bersama. Di samping itu, kelompok swadaya masyarakat merupakan wahana bagi terselenggaranya proses belajar-mengajar dan pengambilan keputusan. Adanya kelompok seperti ini akan menjadikan swadaya masyarakat lebih *berprospek* (Mubyarto, dkk., 1994: 208).

Dengan demikian menurut hasil penelitian Mubyarto dkk., (1994) ditemukan adanya peran positif dari lembaga swadaya masyarakat baik dalam tataran perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dalam wacana empiris hal ini nampak tidak dapat dielakkan, karena jiwa guyub rukun (gotong-royong) yang menjadi bagian integral kehidupan bermasyarakat bagi bangsa Indonesia (yang merembes pada pranata sosial) tidak mudah dapat dikikis habis oleh era kesejagadan (globalisasi).

Di Indonesia kedua lembaga tersebut secara teoritik diharapkan berjalan beriringan dan saling bahu-membahu, baik dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Pola integrasi kelembagaan, dengan demikian mengarah pada integrasi antar lembaga-lembaga formal dan informal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan, walaupun harus diakui bahwa model perencanaan atau kebijakan pembangunan yang bersifat top down masih sangat kuat (Ismani, 1991: 56).

Kerangka ideal ini memperlihatkan bahwa keinginan elit politik di negeri ini semakin kokoh manakala dilihat dalam perspektif normatif. Kehendak elit politik pemegang tampuk pemerintahan yang antara lain tercermin di dalam peraturan perundang-undangan menganggap perlu merampatkan mekanisme atau birokrasi mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Padahal pada tataran empirik masing-masing desa dalam daerah tertentu tentunya memiliki karakteristik cukup berbeda. Karenanya perlakuan yang sama dalam upaya pembinaan pemerintah adalah suatu hal yang patut dipertanyakan.

Jauh sebelum ilmuwan modern berbicara tentang kebijakan publik yang sarat nilai dan atau berbasis lingkungan, didalam syariat Islam justru meletakkan sistem nilai yang berbasis tauhid niscaya mendasari seluruh sistem kehidupan manusia. Do'a yang sangat populer diabadikan di dalam Al-Quran (Surat Al Bhaqarah : ....) mengisyaratkan tentang dibutuhkannya nilai-nilai yang trasendental, sakral dan monumental harus selalu bersanding dengan nilai-nilai yang provan duniawi. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang Kebijakan Publik para ahli sepakat tentang nilai-nilai yang ada didalamnya. Tidak ada kebijakan publik yang tidak sarat nilai. Jika diperhatikan kehidupan masyarakat dan bangsa di dunia ini maka tidak satupun didalam sistem pergaulan sosial maupun hal-hal yang bertalian dengan kebijakan publik yang tidak menampilkan penerapan sistem nilai yang diakui dan tumbuh kembangkan oleh masyarakat dan bangsa tersebut. Sistem nilai terbaik di dunia yang telah dikristalisasi oleh *founding fathers* bangsa Indonesia antara lain Soekarno (Presiden Pertama Republik Indonesia) yaitu Pancasila. Pancasila tidak berlebihan jika disebut fondasi sistem nilai terbaik di dunia karena mewakili nilai-nilai yang mapan dan *sophisticated* yang niscaya dapat di terima oleh dunia.

Pada tataran empirik semua orang dapat membaca bahwa kebijakan publik yang diakui syarat nilai namun sama sekali tidak memperhitungkan nilai-nilai agama pada saat proses pembuatan kebijakan publik. Jauh di tahun 1990-an Guru Besar Ilmu Administrasi Publik (Miftah Thoha, 1994) Universitas Gajahmada (UGM) memperingatkan tentang kelemahan kebijakan publik yang tidak menyertakan nilai-nilai keagamaan. Sementara (Indarwanto, 2011) mensaratkan bahwa setiap kebijakan publik itu niscaya selalu didasarkan pada nilai nilai Ketuhanan yang terejahwantah di dalam :

1. Keimanan
2. Keadilan
3. Kejujuran
4. Kebenaran
5. Kebijakan
6. Ketulusan
7. Kecintaan
8. Kekerabatan
9. Kesukuan
10. Kebangsaan
11. Kesemestaan

Tidak ada artinya sejumlah institusi pendidikan tinggi dan pencinta lingkungan hidup yang terorganisasi serta suara ulama berbicara tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan hidup jika tidak diikuti atau diimbangi *political will* dari pemerintah secara nyata. Untuk itu kerjasama yang terintegrasi antara berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah keniscayaan yang utama.

Sependapat dengan Treanor, 2001 bahwa untuk mewujudkan pembangunan atau kebijakan publik yang berwawasan lingkungan tidak sekedar dibutuhkannya suara mayoritas. Tidak jarang suara mayoritas yang merupakan ciri dasar demokrasi dalam

memenangkan opsi kebijakan publik mencederai hati nurani rakyat. Demokrasi adalah bentuk lain dari kebohongan terstruktur yang berbasis suara mayoritas.

Pendapat ini merupakan peringatan bagi insan terdidik agar lebih mencermati serta berhati-hati ketika merekomendasikan penerapan demokrasi di bumi pertiwi. Tanpa bermaksud sekedar menghisap jempol maka jika memang harus berbicara demokrasi, Demokrasi Pancasila adalah keniscayaan untuk diterima sebagai format berbangsa dan bernegara (Soekarno, 1964 dan Latief, 2013).

Nilai nilai sakral dan ideal didalam Pancasila pasti dapat diterapkan didalam kehidupan sehari hari sebab nilai tersebut justru digali dan diambil dari nilai nilai yang tumbuh dan berkembang di Indonesia- bahkan nilai nilai dasar yang ada diseluruh dunia.

Ketika kita berbicara nilai didalam kebijakan publik yang berbasis lingkungan, pendekatan lintas disiplin ilmu adalah keniscayaan untuk itu parspektif hukum lingkungan harus menjadi salah satu pilar formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik (Supriadi, 2006). Tidak kalah pentingnya pendekatan yang berbasis sosiologi kesehatan lingkungan termasuk didalamnya menejemen atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan menjadi keharusan untuk dijadikan penyanggah kebijakan publik (Sarudji, 2006, Mitchel, Setiawan, Hadi Rahmi, 2000, Sarudji, Ed., 2009, Soemarwoto, 1996, Dwi Susilo, 2012).

Berdasar sejumlah pendekatan teoritik tersebut jika disimpulkan bahwa kebijakan publik yang berbasis lingkungan didalamnya niscaya terdapat unsur :

1. Nilai nilai Idiologis atau Filosofis,
2. Nilai nilai kearifan lokal
3. Nilai guna spiritual dan fisik
4. Hukum lingkungan,
5. Kesehatan lingkungan,
6. Keberlangsungan flora dan fauna,
7. Keberlanjutan pembangunan yang berbasis lingkungan

Dimensi dimensi kebijakan yang nampaknya lengkap tersebut masih menyisakan permasalahan empirik namun sering kali dikatakan tidak ilmiah yaitu dimensi alam ghaib. Pada tatanan empirik saat diimplementasikan sebuah kebijakan tidak jarang dihadapkan pada masalah yang ghaib. Masalah masalah tersebut antara lain;

- a) Kesurupan massal sejumlah siswa disuatu institusi,
- b) Kesurupan massal disejumlah perusahaan,
- c) Pohon sulit ditebang saat akan memulai pembangunan
- d) Mesin produksi tidak dapat dioperasikan meskipun kondisinya baik
- e) Penampakan makhluk ghaib diruang kelas atau ruang kerja, dll

Meskipun sejumlah hal tersebut diatas tidak selalu terjadi dalam keseharian namun cukup mengganggu proses belajar mengajar maupun proses produksi termasuk didalamnya proses pelaksanaan pembangunan sarana prasarana. Oleh sebab itu sudah waktunya kebijakan publik yang berorientasi lingkungan juga menyertakan atau menghitung dimensi ghaib didalam formulasi, implementasi, dan evaluasi. Hal ini dirasa penting atau bahkan dibutuhkan jika benar benar ingin meningkatkan kualitas kebijakan publik yang berorientasi lingkungan.

#### **IV. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH**

Pada saat dicermati dengan seksama sebagaimana yang terlukis di dalam latar belakang proposal ini bahwa PPSUB interdisipliner sejak berdiri sampai saat ini benar-benar belum memiliki surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). Sementara ini SKPI sangat dibutuhkan sebagai salah satu piranti kompetensi bagi calon alumni atau alumni PPSUB baik program Magister maupun program Doktor. Tuntutan dunia kerja baik disektor publik

koperasi maupun swasta menuntut adanya nilai lebih dari lulusan institusi pendidikan tinggi yang membekali mahasiswanya dengan SKPI. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Harapan dunia kerja setiap lulusan perguruan tinggi memiliki kapabilitas yang tidak sekedar teoritis namun lebih dari itu juga harus mampu menjawab permasalahan yang nyata.

Bertalian dengan itu masalah yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Apakah upaya yang niscaya dilakukan oleh PPSUB untuk mewujudkan SKPI dalam perspektif formulasi kebijakan yang berbasis lingkungan ?
2. Bagaimana usaha yang dilakukan PPSUB untuk mewujudkan SKPI ?
3. Mengapa SKPI dibutuhkan oleh calon alumni PPSUB ?

## V. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini melibatkan dosen, mahasiswa dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PPSUB untuk mewujudkan SKPI
2. Upaya PPSUB untuk mewujudkan SKPI melalui pendidikan dan latihan kebijakan publik yang berorientasi lingkungan
3. SKPI bertujuan untuk lebih membekali mahasiswa atau calon alumni agar lebih memiliki kompetensi di dunia kerja

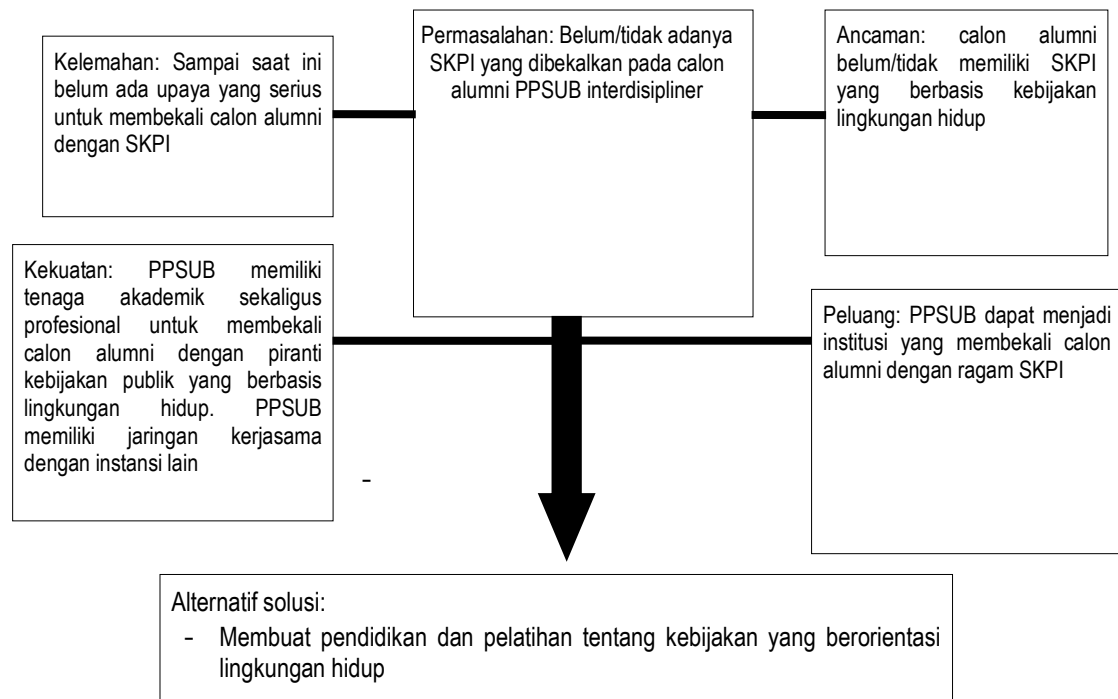
## VI. MANFAAT KEGIATAN

Manfaat dari kegiatan ini antara lain :

- a. Bagi calon alumni PPSUB interdipliner :
  1. Menambah wawasan secara akademik dan praksis tentang kebijakan publik yang berorientasi pada lingkungan.
  2. Melatih mahasiswa memiliki wawasan yang terintegrasi antara berbagai bidang ilmu untuk menganalisis kebijakan publik yang berorientasi lingkungan.
  3. Membekali calon alumni agar lebih memiliki kapabilitas pemecahan masalah publik yang berorientasi ling berkelanjutan dan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*)
- b. Bagi PPSUB Interdisipliner :
  1. Memperkuat daya tawar pada dunia kerja baik publik, privat, maupun lainnya sehingga lebih diperhitungkan ketika persaingan institusi pendidikan tinggi kian hari semakin ketat.
  2. PPSUB lebih memiliki kewibawaan akademik dan empiris yang berhubungan dengan kebijakan publik yang berorientasi lingkungan
  3. Dapat meningkatkan martabat PPSUB dilihat dari kaca mata kebijakan publik yang tertuang di dalam serangkaian peraturan perundang-undangan.

## VII. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Untuk memberikan kontribusi pada PPSUB khususnya calon alumni yang program studinya berorientasi pada lingkungan hidup berbekal pendidikan dan latihan analisis kebijakan khususnya dalam fase formulasi yang berorientasi pada lingkungan hidup diharapkan solusi yang ditawarkan oleh calon alumni mampu memberikan jawaban sesuai yang diharapkan policy makers, policy stake holders dan masyarakat pada umumnya. Sinergi pengelola PPSUB dengan calon alumni dalam rangka mewujudkan SKPI akan memberikan bobot tambahan terhadap keberadaan alumni di pentas dunia kerja. Adapun model pemikiran sebagai kerangka pemecahan masalah adalah sebagai berikut :



### VIII. KHALAYAK SASARAN ANTARA

Calon alumni program Magister dan program Doktor PPSUB interdisipliner dan atau program Magister dan Doktor monodisipliner.

### IX. KETERKAITAN

Kegiatan pengabdian ini merupakan pengejawantahan nyata dari PPSUB interdisipliner pada calon alumni agar setelah lulus memiliki kemampuan tambahan yang positif. Pada gilirannya berbekal SKPI diharapkan mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah, mampu membaca kemampuan, peluang dan membuat solusi terhadap permasalahan publik sehingga dapat dirumuskan menjadi kebijakan publik yang berorientasi lingkungan hidup.

### X. METODE PELAKSANAAN

1. Analisis permasalahan, kebutuhan khalayak sasaran antara, dan sumber daya yang tersedia adalah tahap awal yang dilakukan pertama kali. Selanjutnya, informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan persiapan dan penyusunan proposal pengabdian;
2. Penyusunan materi SKPI berikut instruktur yang memiliki kapabilitas di bidang proses pembuatan kebijakan publik yang berorientasi pada lingkungan hidup.
3. Revitalisasi kapabilitas calon alumni dengan cara melakukan pendidikan dan latihan tentang kebijakan publik yang berorientasi lingkungan.
4. Bagi alumni yang mengikuti pendidikan dan penelitian kebijakan publik yang berorientasi lingkungan diberikan SKPI.
5. Evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan akhir.

### XI. RANCANGAN EVALUASI

Evaluasi kegiatan dilakukan pada setiap awal dan akhir proses yang dilakukan dengan cara mengkritisi materi yang diberikan pada saat pendidikan dan pelatihan, capaian yang diharapkan dari kegiatan dapat diketahui.

<b>Capaian yang diharapkan</b>	<b>Kriteria keberhasilan yang ditargetkan</b>
Peningkatan pemahaman calon alumni terhadap kebijakan publik yang berorientasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90% paham terhadap kebijakan publik yang berorientasi lingkungan hidup</li> <li>• 80% calon alumni mampu membuat konsep kebijakan publik yang berorientasi lingkungan</li> <li>• 90% calon alumni paham tentang dibutuhkannya kebijakan publik yang berorientasi lingkungan</li> </ul>
Peningkatan kualitas calon alumni terhadap pemahaman kebijakan publik yang berorientasi lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 % peserta pendidikan dan latihan dapat mengikuti sampai paripurna</li> </ul>
90 % mampu membuat konsep kebijakan publik yang berorientasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 % mampu membuat konsep kebijakan publik yang berorientasi lingkungan</li> </ul>

## **XII. RENCANA DAN JADWAL PENGABDIAN**

<b>Tahapan kegiatan</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>M</b>	<b>J</b>	<b>J</b>	<b>A</b>	<b>S</b>
Survei, penyusunan proposal dan modul/ <i>leaflet</i>	v	v	v				
Koordinasi sivitas akademika JBUB dengan warga desa			v				
Pengenalan dan penjelasan konsep desa agroekowisata				v	v		
Evaluasi kegiatan			v	v	v		
Pembuatan presentasi & laporan akhir			v	v	V	v	v

### XIII. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta.
- Amien, M. Rais, 2010, *Selamatkan Indonesia*, PT Gramedia Jakarta
- Bunch, Roland, 1992, *Dua Tongkol Jagung*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Dunn, William, 1995, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta.
- Hakim, Luqman, 1993, *Peranan Negara Dalam Kehidupan Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*, dalam jurnal Ilmu Politik, Nomor 14 tahun 1993: 21-29
- Harjono, Joan, 1983, *Rural Development in Indonesia: The Top Down Approach* dalam David A.M dan D. . Chaudri (Ed...) *Rural Development and The State*, Metthuen, London
- Indarwanto, 2003, *Teori Kebijakan Publik dalam Perspektif Transendental*, Taroda, Malang.
- Islami, Moch. Irfan, 1993, *Prinsip-prinsip Kebijakan Publik*, Jakarta.
- Ismani, H. A., 1991, *Sosiologi Pembangunan Desa*, Diterbitkan Atas Kerjasama PPIIS dan FIA Universitas Brawijaya Malang
- Ismunawan, Bambang dan Kartjono, 1985, *Kemandirian Kelompok Swadaya dan Peranannya dalam Menciptakan Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, dalam Mubyarto (Ed.), *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, BPFPE, Yogyakarta
- Ismunawan, Bambang, 1992, *Partisipasi dan Dimensi Keswadayaan dalam Pengembangan Swadaya Nasional: Tinjauan Ke Arah Persepsi Yang Utuh*, LP3ES, Jakarta
- Latief, Yudhi, 2013, *Pancasila*, Jakarta.
- Mas' oed, Mohtar, 1989, *Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971*, LP3ES, Jakarta
- Mas' oed, Mohtar, 1994, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mitchel, Bruce, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, 2000, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- Mubiarto, dkk., 1994, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, P3PK Universitas Gajahmada Yogyakarta dan Aditya Media Yogyakarta
- Sanit, Arbi, 1995, *Ormas dan Politik*, Penerbit LSIP, Jakarta
- Soemarwoto, Otto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarudji, Didik, 2006, *Kesehatan Lingkungan*, Mitra Meraih Prestasi, Surabaya.
- Susilo, Rachmad K. Dwi, 2012, *Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, Ar-Ruzz Media, Jakarta
- Sarudji, Didik, 2009, *Wawasan Lingkungan*, Media Ilmu, Surabaya.
- Suratmo, F. Gunarwan, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press
- Siregar, Doli D., 2004, *Manajemen Aset*, PT. Kresna Prima Persada, Jakarta.
- Soekarno, 1964, *Dibawah Bendera Revolusi*, Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Tjondronegoro, S. Soediono M. P., 1977, *Lembaga Swadaya Masyarakat*, LP3ES, Jakarta
- Treanor, Paul, 2001, *Kebohongan Demokrasi*, Istawa, Yogyakarta.



### **XIII. ALOKASI DAN PERINCIAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN**

No	Seksi	Nama Personal	Dana dalam Rp.
	Narasumber	Dr. M. Razif	1.500.000
		Dr. Imam Hanafi, M.Si	1.000.000
		Dr. Bagyo Yanuwadi	1.000.000
	Uang Transport undangan	30 orang @ Rp.100.000,-	3.000.000
	Dana Konsumsi	70 Orang @Rp.30.000,-	2.100.000
	Dana ATK, backdrop, sertifikat	Rp.900.000,-	900.000
	Penulis Proposal	Rp.750.000,-	750.000
	Laporan	Rp.700.000,-	700.000
	Honor Team	@Rp.750.000,- X 3 orang	2.250.000
	Sub Jumlah		13.200.000
	Panitia	MC	200.000
		Cleaning Service 1 orang	200.000
		Scuriti 1 orang	200.000
		Front Desk 1 orang	200.000
		Sound System 1 Orang	200.000
		Penata kursi 3 orang @ Rp.200.000,-	600.000
		Bendahara 1 orang	200.000
	Total Dana		15.000.000

## **XV.LAMPIRAN**

### **MATERI PENDIDIKAN DAN LATIHAN FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS LINGKUNGAN**

<b>NO</b>	<b>MATERI</b>	<b>PEMATERI</b>	<b>MODERATOR</b>
1	Memahami Formulasi Kebijakan Publik berbasis Lingkungan		
2	Formulasi Sebagai Pilar Kebijakan Publik		
3	Intervensi Pemerintah Terhadap Kebutuhan Publik		
4	Keterlibatan Masyarakat Pada Formulasi Kebijakan Publik		
5	Peran Lembaga Sosial Dalam Formulasi Kebijakan Publik		
6	Isu Sosial Berbasis Kebutuhan Masyarakat		
7	Masalah Formulasi Kebijakan Publik		
8	Perumusan Masalah Dalam Formulasi Kebijakan Publik		
9	Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Publik		
10	Formulasi Kebijakan Publik Berbasis Lingkungan Ideologis		
11	Agenda Publik Sebagai Basis Kebijakan Publik		